

MEMINIMALISIR KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Nurul Anisa

nurulanisa999an@gmail.com

Windi Istiqomah

windi.istiqomah@gmail.com

Eka Tertiana

tertiananasir@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Abstract To minimize dishonesty, it is necessary to have Internal Operations which play a very important role in an organization. Effective internal operations will cover the possibility of fraud in accounting. The internal operating tools help lay the auditor's confidence about his / her financial statements from possible fraud and errors. In order for the Institution to improve the internal operating structure, implement and monitor it so that the company can be realized, good internal operations will ensure the accuracy of the resulting accounting data so that the data cannot be trusted. The purpose of this study is to analyze fraud in financial reporting. This research was conducted using a qualitative descriptive method. Data taken from research PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang. The results showed that the operating environment, risk determination, operating activities, accounting information and communication systems, and individually (partially) or collectively (simultaneously) played quite a role in anticipating the trend of accounting insincerity. The author reports that internal control is very important in terms of management, supervision and company procedures. The author also provides suggestions for each company to control the internal system and evaluate the work performed by the company's internal auditors.

Keyword : *Internal Operation, Tendency of Insincerity Accountancy*

1. PENDAHULUAN

Di instansi atau perusahaan terdapat dua kecurangan yaitu kecurangan internal dan eksternal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan (Amin Widjaja, 2013).

Lemahnya sistem pengendalian internal membuat seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Bentuk kebijakan yang disengaja merupakan adanya tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi yang tujuannya untuk memanipulasi atau melakukan kecurangan yang merugikan pihak lain. Berbagai bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu, seperti kecenderungan untuk melakukan tindak korupsi, kecenderungan untuk penyalahgunaan aset, dan kecenderungan untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu (Soepardi dalam Fauwzi, 2011 : 1). Kecurangan Akuntansi (fraud) yang terjadi menjadi salah satu cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 Tahun 1999).

Banyak terjadi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) atau fraud di Indonesia belakangan ini, hal ini menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia dan di

dunia. Di sektor publik bentuk Kecenderungan Kecurangan Akuntansi terjadi dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dilakukan dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009:2). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tak luput dari permasalahan aksi kecurangan akuntansi. Yuli (2013) dalam (Irwansyah & Supriadi, 2018) menyatakan Kecurangan merupakan suatu istilah umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas Internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern.

Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi harta perusahaan, memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Hery (2013 : 87).

Pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi. Instansi berusaha untuk membuat struktur pengendalian internal dengan baik, melaksanakan, dan mengawasinya agar efektivitas perusahaan bisa tercapai, pengendalian internal yang baik akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dihasilkan sehingga data tersebut dapat dipercaya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: 1) Salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, 2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Definisi fraud menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) adalah suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Definisi fraud di atas menunjukkan aspek dari fraud yaitu ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 1774-1799 1780 penipuan (deception), ketidakjujuran (dishonest), dan niat (intent). Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Menurut Scott (2000) asimetri informasi menimbulkan adanya moral hazard yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang

manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Prinsipal harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan sistem pengendalian yang efektif untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan antara lain: 1) apa yang dimaksud dengan peran pengendalian internal; 2) apa yang dimaksud dengan fraud; 3) apa yang dimaksud dengan teori *triangle fraud*; 4) apa yang dimaksud dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Lima komponen dalam pengendalian secara internal berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* Menurut Hery (2013 : 90-101), yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan ini terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.

Adapun lingkungan pengendalian antara lain : (1) Integritas dan Nilai-Nilai Etis yang meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Caranya adalah melalui sosialisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai entitas yang harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalankan oleh seluruh karyawan. Integritas dan nilai-nilai etis ini dituangkan dalam sebuah standar etika atau kode perilaku, agar terhindarnya terjadi kecurangan didalam perusahaan. (2) Komitmen dan Kompetensi harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya, agar membawa pengaruh keperusahaan (3) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit yang berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. Selain itu, komite juga bertugas untuk melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan auditor internal maupun auditor eksternal, termasuk menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan oleh para auditor eksternal, karna ini membawa pengaruh juga bagi perusahaan tentunya. (4) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen melalui prinsip dan sikap manajemen bagi para karyawannya, (5) Struktur Organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian, dan (6) Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia meliputi metode atau kebijakan untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada karyawan.

2. Penetapan Resiko

Penetapan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum di Indonesia. Meliputi ; (1) Rotasi Pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rutinitas yang diterapkan, (2) Prosedur yang Jelas mengenai penggunaan formulir-formulir atau dokumen-dokumen pengelolaan keuangan perusahaan, dan (3) Pertanggungjawaban Transaksi, dimana setiap terjadinya transaksi di pertanggungjawabkan kepada bagian keuangan pusat.

3. **Aktivitas Pengendalian**

Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan dengan semestinya. Kebijakan tersebut terdiri dari: (1) Pemisahan Tugas, seperti pekerjaan memiliki kedudukan dan tugas yang berbeda, harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional), (2) Otorisasi yang Tepat atas Transaksi, artinya transaksi pembayaran kas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari pihak yang berwenang, (3) Dokumen dan Catatan yang Memadai, dapat diliputi pendokumentasian dilakukan ketika transaksi terjadi, dan dokumen seharusnya 14 bernomor urut tercetak dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan hal ini sangat terkait dengan pengamanan terhadap aktiva seperti; uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan di dalam safe box, catatan-catatan akuntansi yang penting harus di simpan dalam filing cabinet yang terkunci, tidak semua atau sembarangan karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagang, penggunaan kamera dan televisi monitor, adanya sistem pemadaman kebakaran atau alarm yang memadai, dan penggunaan password system, (5) Verifikasi Internal atau Pemeriksaan Independen, meliputi : peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka itu verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan, verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang independen, ketidakcocokan/ketidaksesuaian dan kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat.

4. **Informasi dan Komunikasi Akuntansi**

Komunikasi merupakan segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi. Dan penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi. Tujuan dari sistem ini adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu : transaksi yang dicatat memang ada, transaksi yang ada sudah dicatat, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, transaksi yang dicatat di posting dan diikhtisarkan dengan benar, transaksi diklasifikasi dengan benar, dan transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

5. **Pemantauan atau Pemonitoran**

Pemantauan atau pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Pemantauan/monitoring meliputi; pemeriksaan internal melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, secara rutin dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan dicocokkan dengan catatan yang ada oleh bagian Pemeriksaan Internal, dan rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik yang dilaksanakan yang disesuaikan dengan jumlah dana yang tercantum.

3. **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagai Metode ilmiah, penelitian kualitatif sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dibidang ilmu sosial termasuk pendidikan. Sedangkan deskriptif merupakan upaya mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau suatu daerah menurut (Sugiyono, 2010:62).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran gejala atau fenomena yang lebih detail. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola dari fenomena yang dimaksud. Menurut Sukmadinata (2006: 72) pandangan tersebut menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk pendeskripsian fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

Sumber data dalam penelitian adalah topik darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data pembantu. Data sekunder adalah data berupa dokumen, buku, penelitian sebelumnya, artikel, dll.

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan, laporan, dan bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

Teknik analisis data yang kami gunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 148): Statistik deskriptif adalah data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyadari bahwa keterbatasan waktu, kemampuan dan materi yang penulis kuasai, prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN (Persero) Cabang Tanjungpinang di jelaskan secara garis besarnya saja. Dalam pelayanan pembayaran dana pensiun bagi pesertanya, PT. TASPEN (Persero) Cabang Tanjungpinang memberikan kemudahan berdasarkan prosedur kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa perusahaan menginginkan tercapainya tujuan tersebut dan untuk mencapainya diperlukan pengendalian internal. Perusahaan berusaha untuk membuat struktur pengendalian intern dengan baik, melaksanakan, dan mengawasinya agar efektivitas perusahaan bisa tercapai, dan pengendalian internal yang baik akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dihasilkan sehingga data tersebut dapat dipercaya.

Menurut Hery (2013:87) bahwa tujuan adanya pengendalian internal adalah untuk keandalan pelaporan, keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan. Pada PT. Taspem (Persero) Cabang Tanjungpinang, pengendalian internal dapat ditinjau dari lima komponen berdasarkan Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang telah dianalisis sesuai dengan hasil jawaban 12 responden yang diteliti di PT. Taspem (Persero) Cabang Tanjungpinang, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hasil Analisis 5 Komponen Pengendalian Internal

No	Komponen Pengendalian Internal	% Capaian Peranan Pengendalian Internal	Kesimpulan
1	Lingkungan Pengendalian	77,50%	Berperan
2	Risiko Pengendalian	69,44%	Berperan
3	Aktivitas Pengendalian	73,33%	Berperan
4	Informasi dan Komunikasi	71,43%	Berperan
5	Pemantauan	72,22%	Berperan
6	Peran 5 komponen secara bersama-sama	73,73%	Berperan

Sumber : Olahan, 2014

Berdasarkan tabel di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan dan dirangkum sebagai berikut :

4.1 Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan hal yang paling mendasar dan utama dalam sebuah entitas karena sangat erat kaitannya dengan kebijakan, etika, dan organisasi perusahaan. Hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan operasional yaitu karyawan/sumber daya manusia yang ada dalam entitas tersebut.

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan. Pedoman yang digunakan dalam lingkungan pengendalian pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a) Integritas dan Nilai-Nilai Etis

Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner kepada 12 karyawan dapat diperoleh bahwa pihak manajemen berikan tindakan kepada karyawan yang berlaku tidak jujur, ilegal, dan atau tidak etis, seperti memberikan Surat Peringatan (SP) dan memberikan sanksi-sanksi tindakan indisipliner pada karyawan sesuai dengan standar operasional peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjung pinang. Selain itu, PT. Taspen juga memiliki standar etika secara tertulis. Sehingga menunjang menjalankan tujuan perusahaan.

b) Komitmen dan Kompetensi

Menurut hasil wawancara dan kuesioner kepada 12 karyawan PT. Taspen didapat bahwa terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab pada karyawan yang telah sama dengan tingkat keterampilan maupun pengetahuan karyawan, seperti ijazah pendidikan yang karyawan miliki.

c) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Diperoleh hasil kuesioner bahwa tidak adanya bagian yang berfungsi sebagai tim pemeriksa internal pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang sehingga pengelolaan keuangan belum dapat terkontrol dengan baik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil jawaban kuesioner, 8 responden yang menjawab tidak ada tim pemeriksa internal. Tim pemeriksa internal pada PT. Taspen bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan, pelaksanaan pengendalian intern, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada pihak entitas, sehingga mendorong pengendalian internal dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

d) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Diperoleh gambar dari hasil kuesioner dan wawancara dengan Kepala Cabang PT. Taspen menjelaskan bahwa karyawan tidak dapat diberikan target kerja yang terlalu tinggi hal ini sesuai dengan hasil jawaban kuesioner pada 10 karyawan. Dengan tidak adanya target yang terlalu tinggi dapat menyebabkan karyawan merasa kurangnya tekanan kerja yang dirasa oleh karyawan sehingga hal ini dapat membentuk sikap karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil kuesioner, dari 12 responden terdapat 8 responden yang memberikan jawaban mengenai tidak adanya kecenderungan untuk menghindari resiko. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang merupakan instansi yang tidak baik karena tidak memperhatikan resiko sehingga manajemen dalam mengambil keputusan tidak memerlukan pertimbangan yang matang. Sedangkan berdasarkan Hery (2013 : 91) bahwa untuk menekan resiko maka semua keputusan yang diambil sebaiknya dipertimbangkan dengan baik. Hal ini dapat membentuk prinsip dan sikap kerja karyawan, sehingga adanya pengertian pola ini memungkinkan pihak manajemen dapat dengan mudah melakukan pengendalian internal berdasarkan pembentukan sikap mereka saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e) **Struktur Organisasi**

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bapak Edison Situmorang selaku Kepala Cabang yang mengatakan bahwa: "Struktur organisasi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang sudah sangat jelas, baik dalam pemberian tugas, tanggungjawab, dan wewenang diambil secara jelas." Dengan demikian, adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas akan dapat mempermudah dan memperjelas wewenang dan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen.

f) **Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang menetapkan kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi, dan kompensasi kepada karyawannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Yulhendri selaku Kepala Seksi, Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan kuesioner/angket diperoleh bahwa pihak manajemen PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang yang telah menetapkan dan menjalankan konsep-konsep lingkungan pengendalian dengan baik. Walaupun dalam mengambil keputusan masih bersifat kurang hati-hati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pengendalian internal melalui lingkungan pengendalian telah dijalankan dengan baik dan benar. Dengan artian seluruh karyawan yang ada pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang telah bekerja dengan sangat baik serta bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan pembagian kerja masing-masing. Tidak adanya target kerja yang terlalu membebani menyebabkan karyawan merasa tertekan dan tidak nyaman dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Selain itu, pemberian penghargaan pada karyawan sangat memotivasi untuk meningkatkan kinerja sebaik mungkin, dan pemberian kompensasi dalam bentuk pencairan dana insentif sesuai dengan hasil kerja dan lama bekerja. Dengan demikian peran dari pengendalian internal melalui lingkungan pengendalian sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dan menghilangkan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Analisis hasil jawaban kuesioner yang diperoleh 72,97%. Jika dilihat dari ketentuan yang ditetapkan oleh Sugiyono bahwa nilai 77,50% berada pada kisaran 60-79,9% yang berarti bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi lingkungan pengendalian sangat berperan penting dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan tidak adanya tim pemeriksa internal dan tidak adanya kecenderungan untuk menghindari resiko kerja. Hal ini dapat menyebabkan tidak terkontrolnya pengelolaan keuangan dan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

4.2 Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Penetapan Resiko Pengendalian

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum di Indonesia. Hal ini meliputi :

a) **Rotasi Pekerjaan**

Dimana sebanyak 69,44% atau sekitar 7 responden yang memberikan jawaban bahwa rotasi tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rutinitas yang diterapkan.

b) **Prosedur yang Jelas**

Dari hasil kuesioner diperoleh bahwa dari 12 responden, terdapat 10 responden yang memberikan jawaban bahwa terdapat prosedur yang jelas mengenai penggunaan formulir-formulir atau dokumen pengelolaan keuangan di PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Adanya kejelasan prosedur kerja ini menyebabkan sirkulasi kerja di PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang berjalan dengan lancar dan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan manajemen.

c) **Pertanggungjawaban Transaksi**

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh dari 12 responden, 10 diantaranya memberikan jawaban bahwa setiap terjadinya transaksi di pertanggungjawabkan kepada bagian keuangan pusat. Setiap kejadian di klaim oleh peserta. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa segala transaksi yang terjadi dapat dikontrol secara langsung dengan baik, transaksi ini dilaporkan ke bagian keuangan pusat. Hal ini sangat mendukung adanya pengendalian internal di PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa peranan pengendalian internal melalui penetapan resiko pengendalian belum sepenuhnya dijalankan. Namun hal ini tidak begitu mengganggu operasional yang berjalan di PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa capaian hasil kuesioner sekitar 69,44 %. Hal ini menurut ketentuan Sugiyono, angka tersebut berada disekitaran 60 – 79,9 % yang artinya bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi penetapan resiko pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.

4.3 **Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian ialah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen terlaksanakan. Dari hasil wawancara dengan bagian keuangan dan hasil kuesioner yang diperoleh bahwa hal-hal mengenai :

a) **Pemisahan Tugas**

PT. Taspen menjelaskan bahwa dalam bekerja hendaknya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing bagian, seperti pekerjaan yang berbeda dikerjakan oleh karyawan yang berbeda, adanya pembagian tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional).

b) **Otorisasi yang Tepat atas Transaksi**

PT. Taspen telah menerapkan sistem otorisasi yang benar dimana transaksi pembayaran kas dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini sebelum terjadinya transaksi klaim, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kasi Keuangan dan Kepala Cabang.

c) **Dokumen dan Catatan yang Memadai**

Pada hasil kuesioner menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen ketika transaksi terjadi yang dibubuhi tanda tangan orang yang bertanggungjawab terhadap transaksi tersebut. Selain itu, dokumen yang bernomor urut tercetak memudahkan dalam pengecekan atau audit keuangan yang dilaksanakan dengan mencocokkan bukti-bukti fisik transaksi dengan yang dilaporkan.

d) **Pengendalian Fisik Atas Aktiva Dan Catatan Hal Ini Sangat Terkait Dengan Pengamanan Terhadap Aktiva**

Pada PT. Taspen telah memiliki alat pengendalian aktiva seperti ; uang kas dan surat-surat berharga yang disimpan dalam safe deposits box, catatan-catatan akuntansi yang penting disimpan dalam filing cabinet yang terkunci, tidak sembarangan karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan, adanya sistem pemadaman kebakaran atau alarm yang memadai, dan penggunaan password system. Namun demikian, PT. Taspen belum memiliki atau menggunakan kamera pengawas dan televisi monitor, sehingga masih memungkinkan terjadinya pencurian atas aktiva pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Hal ini berdasarkan kuesioner dari 12 responden yang memberikan jawaban bahwa tidak adanya kamera pengawas dan televisi di tempat-tempat yang dianggap penting.

e) **Verifikasi Internal atau Pemeriksaan Independen**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Revi Murtiarni sebagai Kasi. Keuangan yang menjelaskan bahwa verifikasi internal secara rutin dilakukan oleh pihak manajemen yang meliputi : peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Verifikasi dilakukan secara berkala oleh petugas tertentu yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang dan jika terjadi kesalahan pada pelaporan data maka akan dilaporkan ke tingkatan manajemen untuk diberi tindakan korektif secara tepat.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa peranan pengendalian internal melalui aktivitas pengendalian belum sepenuhnya dijalankan. Karena ada fungsi penting yang belum diadakan seperti tidak adanya pemasangan kamera dan televisi monitoring untuk mengawasi tepat-tempat yang dianggap penting. Namun hal ini tidak begitu mengganggu operasional yang berjalan di PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang yang ada sekarang ini.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa capaian hasil kuesioner sekitar 73,33 % . Hal ini menurut ketentuan Sugiyono, angka tersebut berada disekitaran 60-79,9 % yang artinya bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi aktivitas pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.

4.4 Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Tujuan dari sistem ini adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, seperti yang telah dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang, yaitu : transaksi yang dicatat memang ada, transaksi yang ada sudah dicatat, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, transaksi yang dicatat di posting dan diikhtisarkan dengan benar, transaksi diklasifikasi dengan benar, dan transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Namun pada umumnya responden menjawab tidak adanya peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data oleh karyawan lainnya yang berbeda/independen secara periodik/berkala, sehingga demikian, rawan terhadap penyelewengan.

Berdasarkan analisis hasil jawaban kuesioner pada 12 karyawan PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang diperoleh jumlah persentase sekitar 71,43 %. Dengan demikian pengendalian internal yang ditinjau dari segi informasi dan komunikasi akuntansi cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.

4.5 Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Pemantauan

Pemantauan atau monitoring adalah suatu proses dimana penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang periode tertentu oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan dalam bentuk kuesioner dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pelaksanaan kebijakan dan prosedur kerja oleh pemeriksa internal yang secara rutin dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan dicocokkan dengan catatan yang ada oleh bagian pemeriksa internal, serta adanya kesesuaian jumlah dana dengan rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik yang ada.

Analisis penelitian dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa jumlah persentase sebesar 72,22 % yang berarti bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi pemantauan sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen

(Persero) Cabang Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa responden yang menjawab “Tidak” mengenai adanya Pemeriksa internal yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan dan mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan dicocokkan dengan catatan yang ada oleh bagian Pemeriksaan Internal secara rutin.

4.6 Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Kelima Komponen Tersebut Seperti; Lingkungan Pengendalian, Penetapan Resiko Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi, dan Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi lingkungan pengendalian, penetapan resiko pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis hasil kuesioner dari 12 responden yang diperoleh jumlah persentase sebanyak 73,73 %. Berdasarkan ketetapan dari Sugiyono, angka ini termasuk dalam kisaran 60-79,9 % yang berarti bahwa pengendalian internal secara bersama-sama cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Diketahui bahwa pengendalian internal merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan pada akuntansi maka sebaiknya dilakukan pengendalian internal.

Selain hasil wawancara, juga dilakukan pembagian kuesioner/angket untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam mencegah adanya kecenderungan kecurangan akuntansi oleh karyawan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Adapun hasil kuesioner itu menjelaskan bahwa pengendalian internal secara bersama-sama cukup berperan dalam mencegah adanya kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis menunjukkan bahwa presentase yang diperoleh berada pada kisaran 60-79,9 % sesuai dengan Kriteria Penentuan Persentase, yaitu sekitar 73,73 %.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lingkungan cukup pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.
2. Penetapan resiko pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.
3. Aktivitas pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.
4. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.
5. Pemantauan cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.
6. Lingkungan pengendalian, Penetapan resiko pengendalian, Aktivitas pengendalian, Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan secara bersama- sama cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Taspen (Persero) Tanjungpinang.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini memberikan gambar kepada berbagai pihak manajemen/entitas/ataupun instansi lainnya dalam mengantisipasi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi melalui pelaksanaan Pengendalian Internal. Dengan demikian disarankan kepada :

1. Direktur/Manajemen PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang a. Agar selalu melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan yang telah ditetapkan agar berjalan dengan baik. b. Selain pengendalian internal, sebaiknya memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang untuk berbuat curang terhadap akuntansi entitas, seperti faktor tekanan keuangan yang dihadapi karyawannya dan faktor sikap dan rasionalitas yang dihadapi oleh karyawannya. c. Selalu melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang dan pengawasan terhadap segala transaksi-transaksi yang terjadi dan terhadap laporan keuangan yang dibuat setiap akhir bulan.
2. Kasir Keuangan Disarankan untuk selalu melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap segala jenis transaksi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh karyawannya.
3. Bagi Peneliti Berikutnya Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi melalui beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik), Edisi 4, Buku 2, Jakarta : Salemba Empat
- Arifiyani, Hesti Arlich dan Sukirno. 2012. Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus PT. Adi Satria Abadi Yogyakarta), Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi.
- Fauwzi, M. Glifandi Hari. 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi.
- Fees, Reeve, Warren, 2005. Pengantar Akuntansi, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hery. 2013. Auditing I “Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi”, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan (softcopy edition). Jakarta.
- Ikhsan Arfan. 2009. Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mangkunegara, Irfan. 2013. Apakah Kasus Kredit Fiktif BSM Mengarah ke Accounting Fraud? www.kompasiana.com, Diposkan tanggal 27 oktober 2013 pukul 19:28.
- Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurahman. 2007. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung : Pustaka Setia.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

- Munawaroh. 2011. Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri). Skripsi. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang.
- Munawir, S. 2010. Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta : Liberty.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing & Investigation, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta.
- Sadam, Habil Putra. 2018. Peran Auditor Internal dalam Pencegahan Kecurangan Akuntansi. <https://wikipajak.com/peran-auditor-internal-dalam-pencegahan-kecurangan-akuntansi/>